

# **TESIS**

## **ANALISIS KINERJA BAPPEDA LITBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**(Studi Di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat)**

## **Performance Analysis Of R&D Bappeda In Regional Development Planning**

**(Study At The Research And Development Agency Bappeda,  
Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province)**

**FITRIANI**

**NIM: P022211007**



**SEKOLAH PASCASARJANA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2023**

**ANALISIS KINERJA BAPPEDA LITBANG DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**(Studi Di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat)**

**Performance Analysis Of R&D Bappeda In Regional Development  
Planning**

**(Study At The Research And Development Agency Bappeda,  
Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province)**

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister (S-2)  
Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah (PPW)



Disusun Oleh :

FITRIANI

P022211007

PROGRAM PASCASARJANA  
STUDI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH (PPW)  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**ANALISIS KINERJA BAPPEDA LITBANG DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (Studi di Bappeda Litbang Kabupaten  
Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat )**

**Disusun dan diajukan oleh**

**FITRIANI**

**P022211007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan  
Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 27 Januari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama

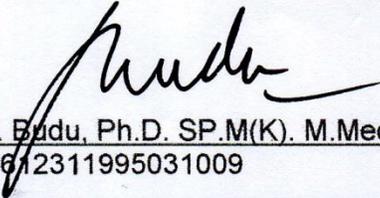
Pembimbing Pendamping

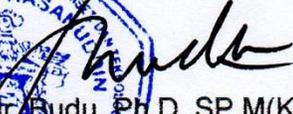
  
Prof. Dr. Rabina Yunus., M.Si  
Nip.196011231986032001

  
Dr. A. Muhammad Rusli., M.Si  
Nip. 196407271991031001

Pt.Ketua Program Studi.  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. dr. Budu, Ph.D. SP.M(K). M.Med Ed  
Nip.196612311995031009

  
Prof. dr. Budu, Ph.D. SP.M(K). M.Med Ed  
Nip.196612311995031009



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitriani  
NIM : P022211007  
Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah (PPW)  
Jenjang : Magister

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

“Analisi Kinerja Bappeda Litbang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Bappeda Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat)”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Fitriani

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segala curahan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan S2 Prodi Perencanaan Pengembangan Wilayah (PPW) di Universitas Hasanuddin Makassar. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang pendidik paling agung, juga teriring salam untuk keluarga beliau, para sahabat, dan segenap manusia yang mengikuti jejak dan sunnah beliau sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini banyak hambatan yang penulis hadapi. Akan tetapi, dengan ucapan *alhamdulillah* dapat terselesaikan meskipun masih memiliki banyak kekurangan. Secara pribadi saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. dr. Budu, Ph.D.,Sp.M(K),M.MedEd. Selaku Pelaksa Tugas Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Univesitas Hasanuddin Makassar
3. Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si\_Selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Andi Muhammad Rusli., M.Si\_Selaku Dosen Pembimbing II

4. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, Drs. Muhammad Yusri Zamhuri.,MA.,Ph.D dan Prof. Dr. Abdul Razak Munir.,SE.,M.Si.Mktg Selaku Dewan Penguji.
5. Ibu, Bapak Dosen yang telah memberikan ilmunya beserta seluruh staff akademik yang turut membantu dalam proses administrasitif mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penelitian hingga terselesaikannya tesis ini;
7. Kepada Orang tua, suami dan anak-anakku atas dukungan, bantuan, kesabaran dan doa selama proses studi hingga terselesaikannya tesis ini;
8. Rekan-rekan kelas pascasarjana atas semangat kekeluargaan, kekompakan, bantuan, dukungan dan doa yang diberikan hingga saat ini;
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan mampu menjadi amal sholeh dan senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sehingga pada akhirnya tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi kita semua. Terima Kasih.

Makassar, 25 Januari 2023

FITRIANI

## ABSTRAK

**FITRIANI.** Analisis Kinerja Bappeda Litbang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat). (dibimbing oleh Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si dan Dr. Andi Muhammad Rusli., M.Si )

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai proses perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan serta faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan studi kasus observasi yaitu kajian memprioritaskan observasi dan partisipasi sebagai teknik pengumpulan data artinya data yang diamati adalah data yang terjadi saat ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hal yang harus diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yaitu kordinasi antar stakeholder, partisipasi masyarakat dan komitmen pemimpin dan DPRD untuk memastikan program prioritas sebagai acuan dalam menerjemahkan visi misi daerah yang telah ditetapkan: (1) Peningkatan kualitas pembangunan manusia; (2) Penguatan struktur perekonomian daerah; (3) Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing; (4) Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; (5) Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan; (6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (7) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik, dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dan arah kebijakan yang mengikuti perkembangan pembangunan nasional dan kebutuhan daerah.

Kata Kunci: *Kebijakan, Perencanaan, Pembangunan.*

## ABSTRACT

**FITRIANI.** Analysis of Bappeda Litbang Performance in Regional Development Planning (Study at Bappeda Litbang, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province). (supervised by Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si and Dr. Andi Muhammad Rusli., M.Si )

This study aims to examine the process of formulating technical policies in development planning and the factors that influence the process of formulating technical policies in the field of development planning in Bappeda Litbang, Pasangkayu Regency.

This type of research is qualitative research. In this research, an observation case study approach is used, namely the study prioritizes observation and participation as a data collection technique, meaning that the observed data are current data.

The results show that there are things that must be considered in the process of formulating technical policies for regional development planning, namely coordination between stakeholders, community participation and commitment of leaders and DPRD to ensure priority programs as a reference in translating the regional vision and mission that has been determined: (1) Improving the quality of development man; (2) Strengthening the structure of the regional economy; (3) Expansion of productive and competitive economic activities; (4) Strengthening and equitable distribution of infrastructure development; (5) Reduction of poverty and inequality in rural areas; (6) Improving the quality of the environment; and (7) Improved governance and public services can be implemented properly in accordance with the principles and policy directions that follow national development developments and regional needs.

*Keywords: Policy, Planning, Development.*

# DAFTAR ISI

SAMPUL .....	1
Lembar Pengesahan.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II .....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Bappeda .....	10
B. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	12
a) Perencanaan .....	13
b) Pembangunan .....	14
c) Perencanaan Pembangunan Daerah .....	16
C. Kinerja Pegawai Bappeda Litbang Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat). .....	20
a) Kemampuan .....	21
b) Motivasi .....	22
c) Peta Jabatan.....	23

D. Kerangka Pikir .....	25
BAB III .....	27
METODE PENELITIAN .....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Informan Penelitian .....	29
D. Sumber Data .....	29
1. Data Primer .....	30
2. Data Sekunder .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
1. Observasi .....	31
2. Wawancara Mendalam .....	32
3. Dokumen .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	33
1. Reduksi data .....	33
2. Penyajian Data .....	34
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....	34
BAB IV .....	35
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Gambaran Umum Penelitian .....	35
1. Letak Geografis .....	35
2. Pemerintahan .....	35
3. Kependudukan .....	36
4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat .....	37
B. Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu .....	39
1. Sumber Daya Manusia .....	39
2. Perumusan Kebijakan Teknis Bappeda Litbang Pasangkayu .....	43
3. Arah Kebijakan Pembangunan Bappeda Litbang Pasangkayu .....	46
4. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	54
5. Pembangunan Daerah .....	58
6. Prioritas Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu .....	64

C.	Penguatan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan .....	80
a.	Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga .....	81
b.	Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah ...	82
c.	Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan .....	83
d.	Mengintegrasikan Kebijakan Tata Ruang .....	83
e.	Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Lingkungan .....	83
f.	Terselenggaranya Pemerintahan yang Bermartabat (Bersih dan Tepercaya).....	84
g.	Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional .....	84
D.	Penguatan Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi .....	85
a.	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	85
b.	Reformasi Pelayanan Publik .....	86
c.	Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	87
d.	Melanjutkan Pembinaan Mental Spiritual.....	88
e.	Penguatan Pembinaan Pengawasan Pembangunan.....	90
E.	Faktor Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu .....	91
a.	Prinsip Perumusan Kebijakan .....	93
b.	Prinsip Perencanaan Pembangunan.....	96
c.	Faktor-faktor Strategis yang Berpengaruh dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu .....	100
BAB V	.....	106
PENUTUP	.....	106
A.	Kesimpulan .....	106
B.	Saran .....	108

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan.....	39
Tabel 4. 2 Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan dan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4. 5 angka kriteria kesejahteraan masyarakat menurut BPS .....	48
Tabel 4. 6 Persentase Perencanaan Sarana dan Prasarana Tahun 2018 – Tahun 2021. ....	49
Tabel 4. 7 Kinerja Penyelenggaraan Bappeda Litbang KabupatenPasangkayu .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <b>Peta Jabatan</b> .....	24
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir .....	26

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah pusat dalam memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat untuk membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal, dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Pemerintah daerah berupaya sebaik mungkin untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk memanfaatkan hak otonominya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayahnya. Hal tersebut telah tertuang dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan sebagai titik awal adanya otonomi daerah.

Secara konsepsional pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta pemberdayaan pada masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wujud daripada upaya pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah melalui pembangunan, dimana pembangunan itu sendiri berlandaskan pada potensi serta keadaan masyarakat dan wilayahnya sebagai faktor penunjang pembangunan suatu daerah. Di dalam pembangunan itu sendiri penting sekali yang namanya perencanaan pembangunan, suatu pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila memiliki sebuah perencanaan yang baik dan terarah pada visi bersama serta mampu mengakomodir kepentingan dari masing-masing *stakeholder* misalnya masyarakat, swasta dan pelaku pembangunan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut. Maka dari itu dibentuklah suatu instansi yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau yang di singkat Bappeda litbang. Bappeda Litbang sendiri merupakan badan yang bergerak sebagai lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan peraturan di atas maka Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan Perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukannya dan yang terakhir siapa yang melakukannya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan perencanaan

maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukannya dan yang terakhir siapa yang melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga.

Beberapa teori dan paradigma perencanaan antara lain sebagai berikut : 1) Rasionalitas Komprehensif (Comprehensive Rationality) Sebuah proses terstruktur dari pengambilan keputusan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang diinginkan (ends) dengan mempertimbangkan secara cermat konsekuensi potensial dari alternatif yang tersedia. Rasionalitas berfokus pada: kualitas keputusan, hasil dari proses: nilai -pengetahuan – tindakan , 2) Rasionalitas Komprehensif (Comprehensive Rationality) yaitu proses pengambilan keputusan terstruktur , 3) Advokasi dan Pluralisme (Advocacy & Pluralism) yaitu Perencana mewakili dan mengumpulkan usulan dari para kelompok kepentingan. Perencana membantu berbagai kelompok kepentingan ("klien") untuk mengusulkan tujuan, kebijakan & rencana mereka sendiri Perencana mengadvokasi kepentingan klien Tanggung jawab khusus terhadap kelompok terpinggirkan, 4) Perencanaan Transaktif (transactive planning) Dilakukan secara tatap muka dengan orang-orang yang terkena

dampak keputusan perencanaan, dengan keterlibatan seluruh pengambilan keputusan rencana proses dan menekankan proses pribadi dan organisasi pengembangan dan tidak hanya pencapaian tujuan fungsional, 5) Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning) yaitu Fokus pada praktek partisipasi warga dalam proses perencanaan. Perencana tertantang untuk memperluas peran warga dalam pembuatan rencana dan penerapan, dan 6) Rasionalitas Komunikatif (Communicative Rationality) yaitu Kepentingan publik terungkap melalui interaksi pemangku kepentingan yang berusaha menegosiasikan hasil yang diinginkan dalam proses yang terstruktur dengan baik, fokus pada desain proses dan keterampilan fasilitasi (Brooks 2019).

Perencana adalah seorang ahli yang mampu merancang untuk dan mengatasi kondisi wilayah yang kompleks dengan menggunakan pengetahuan khusus, teknik dan teknologi dalam mendukung proses keputusan terstruktur. Hakekat perencanaan sebenarnya adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di dalam suatu lingkup waktu tertentu serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia masih menempatkan pembangunan sebagai pembangunan fisik yang berupa sarana prasarana dan infrastruktur pendukung berdasarkan hukum atau tatanan kebijakan yang berlaku. Diperlukan sebuah perencanaan pengembangan wilayah untuk

mendukung pembangunan fisik tersebut. Perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sektoral dan regional (Zai 2018).

Dalam hal pembangunan suatu daerah perencanaan sangatlah penting karena dengan menggunakan perencanaan maka diharapkan kita tahu apa saja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan. Pembangunan adalah suatu konsep yang mempunyai tujuan dalam proses menuju kearah perbaikan dan peningkatan. Maka dari itu keberadaan Bappeda Litbang di suatu daerah akan menentukan proses perencanaan yang terstruktur dan sistematis, perencanaan pembangunan diartikan sebagai fungsi utama manajemen pembangunan dalam proses bernegara. Fungsi ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan akan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya. Dengan perencanaan pembangunan yang baik, kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang optimal.

Hal tersebut juga idealnya dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Pasangkayu. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km ke sebelah utara dari Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasangkayu

pada tahun 2020 mencapai 67,79% (BPS Kabupaten Pasangkayu 2021). Jika dilihat dari kondisi sosial dan kesejahteraan rakyat, khususnya pada ranah pendidikan, Kabupaten Pasangkayu mempunyai 135 sekolah dasar, 49 SMP, 12 SMA dan 14 SMK yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu hal penting dalam pembangunan adalah sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu komponen dalam mengukur sumber daya manusia. Dengan SDM yang berkualitas dapat mendorong pembangunan suatu daerah. Tidak hanya pada sosial dan kesejahteraan rakyat, berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara nomor 29 tahun 2016, Bappeda Litbang juga memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada fisik dan infrastruktur wilayah, perencanaan makro, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ekonomi dan sosial budaya, penelitian dan pengembangan. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian saat ini yakni beban kerja Bappeda Litbang yang besar sementara sumber daya yang ada terbatas, baik itu sumber daya aparatur maupun sumber daya berupa anggaran. Sehingga menjadi tantangan bagi Bappeda Litbang untuk melakukan perumusan perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan sumber daya yang ada. Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk mengelaborasi tentang Analisis Kinerja Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi realitas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasangkayu?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasangkayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Litbang di Kabupaten Pasangkayu
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Litbang di Kabupaten Pasangkayu
3. Mengukur kinerja dari Bappeda Litbang di Kabupaten Pasangkayu

## **D. Manfaat Penelitian**

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam Proses Pembangunan. Dengan peningkatan kinerja dari sumber daya Bappeda Litbang akan mendorong pencapaian hasil yang lebih baik bagi proses pembangunan di kabupaten Pasangkayu, Suawesi Barat.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti lainnya yang ingin mengangkat topik penelitian yang serupa, tentu dengan pembahasan dan analisis yang lebih komprehensif.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi lembaga/pemerintah terkait, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kinerja dan sumber daya dalam lingkup Bappeda Litbang di Kabupaten Pasangkayu.
- b. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai fungsi Bappeda Litbang dalam pembangunan daerah
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa depan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Bappeda

Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda RI, yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota). Bappeda merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES No.27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Rizam 2019).

Definisi BAPPEDA (*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*). BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk pada tahun 1980 melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun

1980. BAPPEDA sebagai Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) dalam susunan struktur organisasi diantaranya adalah Tupoksi Kepala Badan, Tupoksi Sekretariat, Tupoksi Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Tupoksi Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah, Tupoksi Bidang Perencanaan Makro, Monitoring dan Evaluasi, Tupoksi Bidang Penelitian dan Pengembangan. Menurut Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis (*juknis*) Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (*BAPPEDA*). Sebagai unsur perencanaan, yang memiliki tugas dan fungsi pokok yaitu:

1. Sebagai Perumusan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Sebagai koordinasi penyusunan rencana yang memuat Visi dan Misi Tujuan Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*).

Seperti yang khalayak ketahui, dalam tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam membentuk kerangka pembangunan di daerah yang kuat untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan (Iqbal and Utomo 2020). BAPPEDA juga memiliki tugas dan fungsi dalam proses perencanaan diantaranya proses Teknokratik, Partisipatif dan proses *Top-down* dan *Bottom-up* dalam tugas dan fungsi pada tahapan perencanaan. BAPPEDA memiliki peran sebagai penyusun rencana, pengendalian dan pelaksanaan rencana. Setelah melewati tahap perencanaan, BAPPEDA

bertugas menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Menurut pemikiran para ahli, BAPPEDA di bentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan merupakan unsur staf dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota berdasarkan Peraturan Daerah (*PERDA*). Tugas pokok BAPPEDA Kabupaten atau Kota adalah membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan fungsi BAPPEDA Kabupaten atau Kota adalah

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Bappeda sebagai Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menurut susunan organisasi secara lengkap yaitu Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Sosial Ekonomi Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Penelitian Pengembangan, Bidang Perencanaan Makro, Monitoring dan Evaluasi, Unit Pelaksanan Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## **B. Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **a) Perencanaan**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya program, rancangan, menyusun konsep, maksud, membuat catatan mengenai pembicaraan dalam rapat, sedangkan perencanaan menurut kamus artinya proses, pembuatan, cara merencanakan (KBBI 2014). Perencanaan didefinisikan sebagai penentuan tindakan yang akan dilaksanakan, perencanaan merupakan suatu proses berkelanjutan dari sebuah rancangan program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu kegiatan yang khusus memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak menguras tenaga, dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang cukup lama, dalam penyusunannya. Akan tetapi bagi orang lain perencanaan dapat berarti suatu pekerjaan sehari hari, tidak rumit bahkan bisa saja orang tersebut tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perencanaan.

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah, Anda harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta

memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut.

Perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan (Taufiqurokhman 2008)

## **b) Pembangunan**

Secara teoritis, konsep “pembangunan” memiliki banyak definisi dan pendekatan. Dalam pembangunan suatu daerah penting adanya sasaran dan target pembangunan daerah, tahap awal pembangunan yaitu harus dimulai dengan perencanaan yang baik dan jelas untuk periode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Sedangkan target adalah sasaran lebih konkret dan spesifik lagi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai pada waktu tertentu. Menurut Todaro (H.M. Safi’l, 2008) pembangunan adalah proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan.

Dalam hal ini, pembangunan juga merupakan arah yang menghasilkan dampak daripada perencanaan pembangunan yang baik, dimana dalam perencanaan pembangunan daerah motor utamanya adalah pemerintah daerah sendiri baik dalam penetapan rencana maupun penyusunan anggaran belanja daerah. Perencanaan pembangunan daerah semakin menentukan karena kewenangan pemerintah daerah sudah semakin besar. Namun demikian, perlu diingat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya (Soleman Andryan Dapakuri 2020). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam proses peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah baik sebagai perumusan kebijakan maupun dalam operasionalisasinya. (Simanjuntak and Silitonga 2020).

### **c) Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Menurut Arthur W.Lewis (Sjafrizal 2014) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Dari penjelasan teori diatas bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu melibatkan aktor-aktor dan *civil society* dalam proses perencanaan pembangunan di suatu daerah, baik itu sumbangsih berupa pikiran, tenaga maupun ide dan gagasan, demikian yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kemudian M.L. Jhingan, seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih konkret tentang perencanaan pembangunan tersebut. Menurut pendapat Jhingan perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula (Sjafrizal 2014).

Istilah perencanaan pembangunan daerah juga menjelaskan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait lainnya dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan prioritas program dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan, Dadang Solihin dalam Dadang Suwanda (2016:27) yaitu:

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antara sub daerah serta antar masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan dan menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Rencana pembangunan daerah juga sebagai salah satu kewenangan yang di berikan dalam rangka otonomi daerah sebagai

kerangka acuan resmi pemerintah dalam memandu dan menilai pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan dalam jangka waktu tertentu. Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa prinsip yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangna daerah, nasional, dan global.
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang di

dasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan (Soleman Andryan Dapakuri 2020).

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi daerah, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, atau menjalankan strategi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu menurut pendapat Arsyad (2000), strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi

pengembangan masyarakat, strategi-strategi tersebut minimal membantu atau salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat (Djadjuli 2018).

### **C. Kinerja Pegawai Bappeda Litbang Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat).**

Dalam menjalankan tugas organisasi, baik dalam lembaga publik maupun komersial, kinerja dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan. Prestasi kerja, atau keluaran yang berkualitas tinggi dan produktif, adalah kinerja SDM. Sumber daya manusia per unit waktu yang dihabiskan untuk tugas pekerjaan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja seorang pekerja adalah hasil dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang mampu dilakukan saat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Setiap karyawan memiliki tingkat keahlian yang berbeda dalam menyelesaikan pekerjaannya, oleh karena itu kinerja karyawan adalah masalah individu atau pribadi. Kombinasi faktor bakat dan motivasi mempengaruhi kinerja. Artinya kinerja adalah proses kerja pegawai yang bekerja selama kurun waktu tertentu dan penekanannya pada bagaimana proses kerja itu bekerja. Kinerja dalam penelitian ini meliputi kinerja yang dilihat dari kemampuan dan motivasi.

### **a) Kemampuan**

Salah satu penentu peningkatan kinerja pegawai adalah kemampuan yang dimiliki pegawai dalam mengelola kemampuan yang dimiliki yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat dalam organisasi untuk berkinerja dengan baik. Peran kinerja sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan pemerintah, tetapi untuk memimpin manusia merupakan hal yang cukup sulit. Tenaga kerja selain diharapkan mampu, cakap dan terampil, juga hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan akan kurang berarti jika tidak diikuti oleh moral kerja dan kedisiplinan pegawai dalam mewujudkan tujuan. Kemampuan merupakan kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang.

Kemampuan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap yang didalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuruan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup dalam kehidupan. Kemampuan dapat dilakukan melalui kegiatan untuk mengembangkan potensi yang dalam hal ini pegawai sesuai dengan karakteristik dalam prospek pengembangan diri. Kemampuan kerja merupakan hal yang

sangat diperlukan seseorang dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu pekerjaan termasuk pegawai sehingga dalam kegiatannya kecakapan ini memiliki peran dalam meningkatkan kinerja atau hasil kerja seseorang atau pegawai. Kemampuan tersebut harus dimiliki pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kemampuan, penguasaan/pemahaman dan profesionalisme pegawai dalam bekerja. Kemampuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, penguasaan dan pemahaman terhadap pekerjaan, dan tingkat profesionalisme pegawai dalam bekerja.

#### **b) Motivasi**

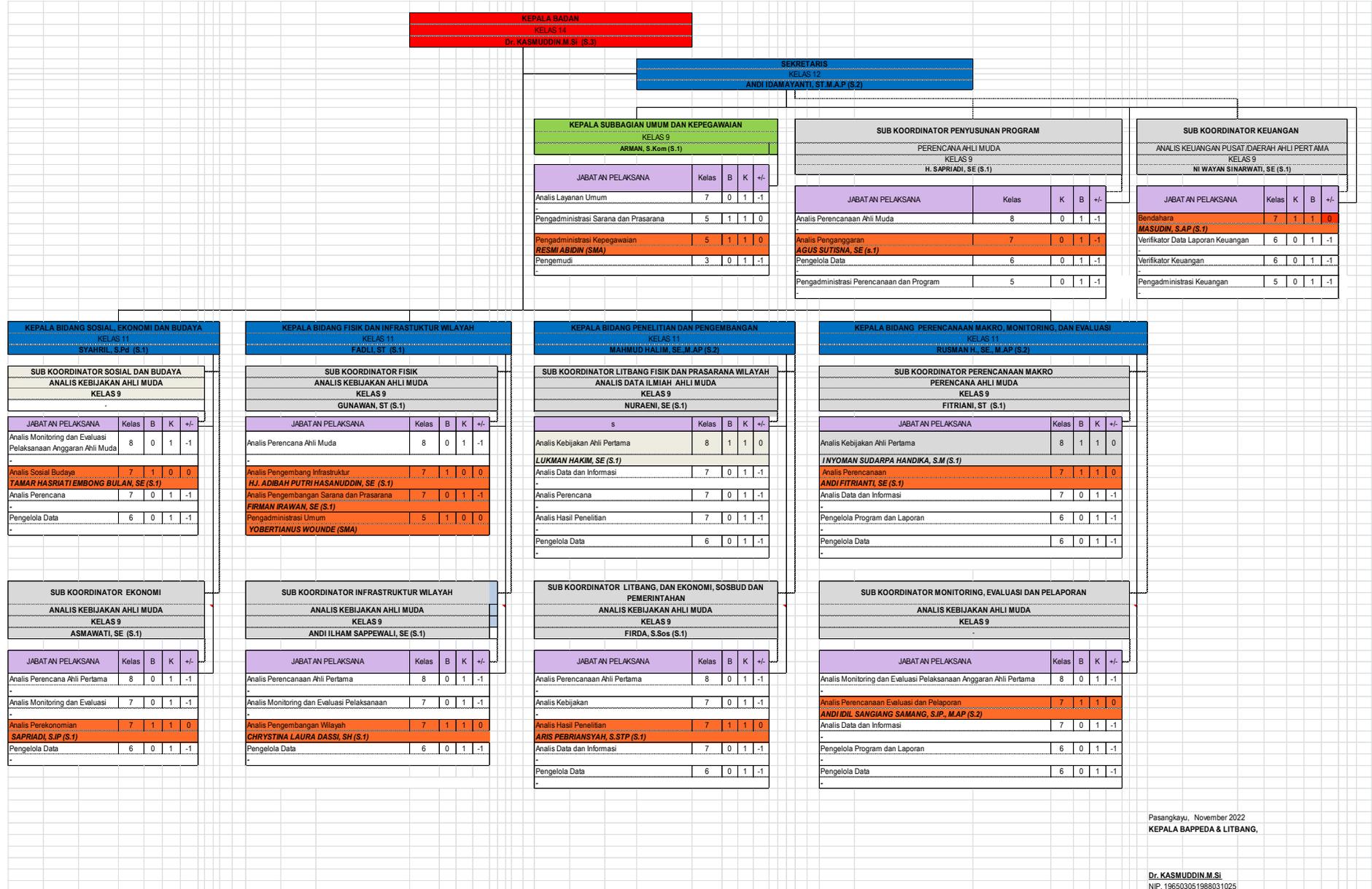
Motivasi merupakan sebuah bentuk dorongan yang diberikan oleh lembaga supaya pegawai mau bekerja sesuai pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai tersebut. Motivasi kerja merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat imbalan berupa gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat mereka bekerja. Motivasi merupakan usaha yang dikeluarkan dan ditunjukkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Usaha yang baik dipengaruhi oleh motivasi atau kemauan dan semangat kerja yang tinggi. Seorang pegawai harus mempunyai usaha dan semangat yang tinggi terhadap pekerjaannya sehingga menciptakan suatu kinerja yang tinggi.

Usaha yang dicurahkan oleh seorang pegawai dipengaruhi oleh motivasi atau kemauan yang bersumber dari dalam diri pegawai dan semangat kerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang dimiliki seseorang dan kekuatan tersebut akan melahirkan intensitas dan ketekunan yang dilakukan secara sukarela. Motivasi ada dua macam yaitu motivasi dari dalam seperti keinginan yang besar yang muncul dari dalam diri individu tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya. Motivasi dari luar seperti motivasi yang bersumber dari luar diri yang menjadi kekuatan bagi individu tersebut untuk meraih cita-tujuan-tujuan hidupnya seperti pengaruh atasan, teman, keluarga, dan sebagainya.

Motivasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemauan atau keinginan yang dimiliki pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang berasal dari dalam (seperti adanya keinginan dan kemauan) maupun dari luar diri pegawai (seperti adanya sarana dan prasarana pendukung) yang ditunjang oleh perilaku kerja yang positif.

### **c) Peta Jabatan**

Gambar 2. 1 Peta Jabatan



#### **D. Kerangka Pikir**

Wujud daripada upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satunya melalui pembangunan, dimana pembangunan itu sendiri berlandaskan pada potensi serta keadaan masyarakat dan wilayahnya sebagai faktor penunjang pembangunan suatu daerah. Bappeda memilii peran penting dalam perencanaan pembagunan daerah, untuk lebih jelasnya, berikut bagan kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2. 2 Kerangka Pikir